

**EFEKTIVITAS PELAYANAN KELUARGA BERENCANA
DI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Peregrinus Rofinus Sanit

NPP. 30.1148

Asdaf Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Program Studi Studi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Email: speregrinus00@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Widodo Sigit Pudjianto, S.H., M.H

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research is focused on the problem of the effectiveness of family planning services at the Department of Population Control and Family Planning of North Central Timor Regency by including the factors that hinder and support the effectiveness of family planning services at the Office of Population Control and Family Planning of North Central Timor Regency. Family planning program services to the community sometimes have weaknesses so that people's understanding becomes less and services do not reach all areas. Purpose:* The purpose of the research was to find out and analyze the effectiveness of family planning program services and the inhibiting factors as well as the efforts made by the Department Population Control and Family Planning Service in overcoming obstacles that occurred in family planning program services in North Central Timor District. **Method:** *This study used qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. Results:* The findings are the Effectiveness of Family Planning Program Services at the Department Population Control and Family Planning Office of North Central Timor District is not effective enough because it has several obstacles such as very binding customs, a lack of field officers and a lack of budget. **Conclusion:** *Researchers recommend good coordination with regional leaders so that adequate budgets can be provided and the addition of field officers to improve service for the better.*

Keywords: *Effectiveness, Service, Family Planning Program*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini difokuskan pada masalah efektivitas pelayanan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Timor Tengah Utara dengan memasukkan faktor-faktor yang menghambat dan mendukung efektivitas pelayanan KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara. Pelayanan program KB kepada masyarakat terkadang memiliki kelemahan sehingga pemahaman masyarakat

menjadi kurang dan pelayanan tidak menjangkau semua daerah. **Tujuan:** Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan program KB dan faktor penghambatnya serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Pelayanan KB dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan program KB di Kabupaten Timor Tengah Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Temuan dari penelitian yang dilakukan yaitu Efektivitas Pelayanan Program KB di Dinas Pengendalian Kependudukan dan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara kurang efektif karena memiliki beberapa kendala seperti adat istiadat yang sangat mengikat, kurangnya petugas lapangan dan kekurangan anggaran. **Kesimpulan:** Peneliti merekomendasikan koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah agar dapat disediakan anggaran yang memadai dan penambahan petugas lapangan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Program KB

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Wasistiono (2003:41) bahwa; salah satu tugas pokok pemerintah yang terpenting adalah memberikan pelayanan umum kepada masyarakat. Oleh karena itu, organisasi pemerintah sering pula disebut sebagai “Pelayan Masyarakat” (Public Servant). Pendapat tersebut berarti pemerintah mempunyai tugas pokok pemerintahan yakni “pelayanan” dalam bentuk memberikan pelayanan umum kepada masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semata-mata untuk memenuhi hak masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan tujuan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik, baik di pusat maupun di daerah, diarahkan untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Salah satu masalah yang dihadapi pemerintah dalam misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu terus meningkatnya laju pertumbuhan penduduk setiap tahun. Meningkatnya jumlah penduduk menyebabkan banyak masalah seperti kemiskinan, kriminalitas, rendahnya pendidikan dan pertumbuhan penduduk yang tidak merata. Selain berdampak kepada masyarakat, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga berdampak terhadap lingkungan yaitu menyebabkan polusi air dan udara, menipisnya sumber daya alam dan terjadinya Global Warming. Sehingga pemerintah wajib untuk memberi perhatian khusus terhadap permasalahan laju pertumbuhan penduduk.

Laju pertumbuhan penduduk ialah sesuatu pertambahan ataupun pengurangan jumlah penduduk di sesuatu wilayah tiap tahunnya. Laju pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tingkat kelahiran serta kematian. Adanya peningkatan pelayanan kesehatan menimbulkan tingkat kematian rendah, sebaliknya tingkat kelahiran masih besar, hal ini ialah pemicu utama dari meningkatnya jumlah penduduk. Upaya yang digunakan untuk mengurangi laju pertumbuhan penduduk, serta guna menghindari terjadinya ledakan penduduk dibutuhkan program keluarga berencana yang jadi salah satu solusinya. Tidak hanya itu program keluarga berencana ialah kebutuhan utama keluarga guna membentuk keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera.

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2025 akan sampai pada angka 284 juta jiwa dan meningkat sebesar 296 juta jiwa pada tahun

2030, kemudian di tahun 2035, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan menjangkau angka 305 juta jiwa. Hal ini membuktikan bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan. Indonesia adalah negara berkembang, dimana laju pertumbuhan penduduk akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan dengan negara maju sehingga berdampak pada peningkatan jumlah penduduk yang sulit dikontrol.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan dan merupakan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) dan jumlah penduduk dari hasil sensus penduduk 2021 sebesar 5,38 juta jiwa. Sejak tahun 2010 jumlah penduduk telah bertambah sebesar 0.64 juta jiwa, hal ini menyebabkan laju pertumbuhan penduduk Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun bertambah 2,06%. Peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk berkaitan dengan pelaksanaan strategi pengendalian pertumbuhan penduduk yang mulai melambat. Salah satu penyebab pertumbuhan penduduk yang besar disebabkan oleh meningkatnya jumlah kelahiran di Nusa Tenggara Timur. Meningkatnya jumlah kelahiran ini adalah persoalan yang belum dapat diatasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, akibatnya meningkatnya jumlah penduduk ini tidak sejalan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia.

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi NTT. Jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Berdasarkan data sensus dari Badan Pusat Statistik tahun 2010, jumlah penduduk Kabupaten Timor Tengah Utara sebanyak 229.803 jiwa sedangkan tahun 2020 jumlah penduduk meningkat menjadi 262.698 jiwa. Sehingga dalam kurun waktu tersebut jumlah penduduk mengalami peningkatan sebanyak 32.895 jiwa. Peningkatan jumlah penduduk ini mengakibatkan masalah bagi pemerintah daerah sebab menimbulkan berbagai masalah sosial diantaranya pengangguran, kemiskinan, kriminalitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Berencana dalam hal mengendalikan penduduk, pemerintah berupaya mengatasi melalui strategi yang dikeluarkan pemerintah yaitu dengan adanya “ Program KB “ oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program KB adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah yang berupaya untuk mengontrol jumlah penduduk. Walaupun pemerintah sudah menerbitkan Program KB, namun karena kurangnya informasi dan edukasi serta sosialisasi menyebabkan program tersebut dirasa tidak berguna bagi masyarakat, akibatnya masyarakat kurang berminat agar ikut serta dalam Program KB. Oleh sebab itu, perlu adanya cara untuk meningkatkan pengelolaan dan pelaksanaan dengan cara pembaharuan Program Keluarga Berencana. Pemerintah berharap melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana mampu mewujudkan keluarga dengan dua anak saja cukup sehingga Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS) dapat tercapai.

Pengendalian jumlah penduduk lewat program Keluarga Berencana (KB) dapat merendahkan angka kelahiran serta angka kematian yang hendak meningkatkan jumlah penduduk usia produktif serta lanjut usia, transformasi komposisi penduduk, derajat pendidikan serta menyusutnya tingkat ketergantungan. Dilansir dari Pos Kupang 2020, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTT mengatakan bahwa masih banyak yang percaya bahwa jika memiliki banyak anak maka akan mendapat rezeki yang banyak pula dan menganggap bahwa belum lengkap apabila belum mempunyai anak laki-laki dan perempuan sehingga masyarakat akan berupaya demi anak laki- dan perempuan.

Peayanan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) harus sampai ke semua wilayah yang ada di Provinsi NTT sehingga demi mengatasi masalah tersebut dibuatlah Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB). Dinas ini terdapat di setiap daerah di Provinsi NTT sehingga pelayanan dan distribusi alat kontrasepsi bisa merata ke seluruh daerah, karena Provinsi NTT adalah provinsi kepulauan. DPPKB dan BKKBN memiliki fungsi yang sama yaitu sama-sama mengendalikan jumlah penduduk dengan cara mengendalikan angka kelahiran, menjalankan program keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga serta mengevaluasi dan melaporkan hasil kinerja mereka. Setiap tahunnya DPPKB melakukan evaluasi terhadap masalah pelayanan alat kontrasepsi, namun apabila dilihat dari jumlah penduduk yang terus mengalami peningkatan setiap tahun membuktikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPPKB belum maksimal dan merata di seluruh daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara.

**Tabel Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2016-2021**

Tahun	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin (Jiwa)		Total
	Laki-Laki	Perempuan	
1	2	3	4
2016	122.209	125.007	247.216
2017	123.384	126.327	249.711
2018	124.384	127.513	251.993
2019	125.600	128.571	254.171
2020	126.586	129.713	256.299
2021	131.664	131.034	262.698

Sumber: Badan Pusat dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa dari tahun 2016-2021, jumlah penduduk di Kabupaten Timor Tengah Utara terus mengalami peningkatan. Tingginya jumlah penduduk ini disebabkan oleh tingginya angka kelahiran dari Pasangan Usia Subur (PUS). Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh DPPKB Kabupaten Timor Tengah Utara mulai menurun dan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mengendalikan angka kelahiran. Edukasi yang diberikan oleh DPPKB Kabupaten Timor Tengah Utara kepada masyarakat masih belum efektif dan maksimal.

**Tabel Jumlah Peserta Aktif KB dan Pasangan Usia Subur
Kabupaten Timor Tengah Utara dari Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	Jumlah Peserta Aktif KB
1	2	3
2019	32488	21996
2020	32303	22387
2021	32742	22491

Sumber: Badan Pusat dan Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 sampai 2021, perbandingan antara Pasangan Usia Subur (PUS) dan peserta yang aktif KB masih tergolong jauh dan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan di setiap tahunnya. Hal ini berarti jumlah pasangan yang tidak ber-KB masih cukup tinggi yang artinya pelayanan KB belum mencapai seluruh daerah di Kabupaten Timor Tengah Utara serta kurangnya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya

pemakaian alat kontrasepsi. Bersumber pada laporan kinerja lembaga pemerintah perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi NTT ada sebagian kasus yang menyebabkan pelayanan KB belum maksimal antara lain: Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah, tenaga penyuluh KB yang mencukupi kriteria hanya 75%, masih ada sarana kesehatan yang belum dimiliki pelayanan KB, penggunaan alat kontrasepsi yang tidak konsisten, serta masih rendahnya keahlian/ kemampuan peserta pelatihan dalam memakai aplikasi E- Learning berbasis IT.

Bersumber pada uraian di atas, permasalahan terkait dengan pelayanan program KB dalam mengendalikan jumlah penduduk dengan mengatur angka kelahiran oleh Dinas Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut:

- 1) Banyak masyarakat yang masih mempercayai budaya lama dan menganggap mengendalikan angka kelahiran melalui program KB tidak terlalu penting.
- 2) Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) tidak sebanding dengan luas wilayah di Kabupaten Timor Tengah Utara.
- 3) Kurangnya anggaran dalam mendukung pelayanan KB.
- 4) Penggunaan alat kontrasepsi yang tidak konsisten.
- 5) Rendahnya keahlian/kemampuan peserta pelatihan dalam memakai aplikasi E- Learning berbasis IT.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, yaitu:

- 1) Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk, Studi di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi. Dewi Febriani (2020). Program Keluarga Berencana yang dilaksanakan BKKBN provinsi Jambi untuk mengendalikan angka kelahiran menghadapi beberapa hambatan seperti: kurangnya petugas. Dalam mengatasi permasalahan tersebut BKKBN mengambil solusi yaitu: Meningkatkan sumber daya manusia khususnya petugas lapangan penyuluhan, menjamin ketersediaan kontrasepsi, meningkatkan akses informasi dan kualitas pelayan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal pemerintah harus terus membaca permasalahan dan memberikan solusi yang tepat dan cepat serta optimal
- 2) Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram. Abdurrahman M. Taufik Rachman², dan Dara Puspita Ayu³ (2019) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam pelaksanaan pengendalian laju pertumbuhan penduduk di kota mataram sudah berjalan cukup efektif walaupun masih terdapat hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan strategi atau program yang dilaksanakan.
- 3) Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Denpasar. Ni Luh Novi Restiyani¹ dan I Gusti Wayan Murjana Yasa² (2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kampung KB di Kota Denpasar belum efektif. Pendidikan istri dan Peran petugas KB berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas program Kampung KB. Hal ini menunjukkan semakin tinggi pendidikan istri dan semakin aktif petugas KB maka pelaksanaan program Kampung KB akan semakin efektif. Pendidikan istri berpengaruh positif dan signifikan, sementara peran petugas KB berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin. Efektivitas program Kampung KB berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kota Denpasar.
- 4) Efektivitas Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Sulawesi Selatan. Dewi Suhartini (2019). Pelayanan KB yang berkualitas berdampak pada kepuasan

masyarakat yang dilayani dan tetap berdasarkan Inovasi dari pelayanan KB dan kompetensi tenaga yang memberikan pelayanan sangat menentukan kualitas pelayan yang diberikan selain faktor lain seperti: alat dan obat kontrasepsi, prasarana dan saran penunjang. Pelayan KB yang berkualitas adalah pelayanan yang memberikan tingkat komplikasi yang rendah dan tingkat kegagalan yang rendah. Fakta yang ditemukan dilapangan bahwa di kota Makasar para masyarakat masih kurang menerima konseling sehingga keputusan pemilihan alat/cara KB belum sepenuhnya di dasarkan pada pengetahuan yang cukup. Penelitian Dewi Suhartini menunjukkan bahwa Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) KB melalui televisi maupun poster/pamflet memperlihatkan pengaruh yang sangat baik terhadap kepesertaan ber KB.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana pada keempat penelitian ini peneliti menemukan bahwa permasalahan yang dibahas memiliki kesamaan dengan fokus masalah yang ingin diteliti, sehingga peneliti mendapatkan gambaran dari fokus penelitian peneliti yaitu efektivitas pelayanan program KB di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara.

1.5. Tujuan.

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan program KB dan faktor penghambatnya serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Kependudukan dan Pelayanan KB dalam mengatasi hambatan yang terjadi dalam pelayanan program KB di Kabupaten Timor Tengah Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Fokus yang akan diteliti penulis pada penelitian ini yaitu pelayanan keluarga berencana. Pelaksanaan program tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk efektivitas pelayanan yang dilihat dari dimensi kebijakan berdasarkan Teori Gibson (1996) dan Steers (1985) dalam Sumaryadi (2005:107) yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Efektifitas Pelayanan Program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara

Berdasarkan yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers dalam Sumaryadi (2005:107), untuk mengukur efektivitas ada lima kriteria, yaitu produktivitas, mutu, efisien, fleksibilitas dan kepuasan. Dalam analisis yang digunakan penulis yaitu menggunakan lima indikator yang telah dikemukakan Gibson dan Steers. Kelima indikator dari teori tersebut sudah cukup untuk mengukur Efektivitas pelayanan program keluarga berencana di Kabupaten Timor Tengah Utara. Berikut hasil analisis dimensi dari efektivitas yang dikemukakan oleh Gibson dan Steers yang kemudian penulis jelaskan melalui pembahasan berikut ini:

3.1.2 Produktivitas

Banyaknya masyarakat yang masih menganut budaya lama seperti banyak anak banyak rejeki membuat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara terus bekerja keras dalam mengajak masyarakat agar mau aktif mengikuti program KB terutama bagi

Pasangan Usia Subur (PUS) dengan cara sosialisasi melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).

1. Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan edukasi dan informasi kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara untuk menjadi peserta KB aktif sebagai cara mengendalikan angka kelahiran. Sasaran utama dari dinas adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang memiliki umur 20 – 45 tahun. Peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah mengajak dan menyuluh kepada masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan *unmet need* (kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi) di masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara.

Tabel Jumlah Pasangan Usia Subur yang menjadi Peserta KB Aktif di Kabupaten TTU Tahun 2022

NO	KECAMATAN	PUS	Peserta KB (Aktif)	PUS yang belum terpenuhi	%
1	2	3	5	4	6
1	Miomaffo Barat	2071	1039	1032	50,17
2	Miomaffo Tengah	796	620	176	77,89
3	Musi	622	320	302	51,45
4	Mutis	1007	612	395	60,77
5	Miomaffo Timur	1578	748	826	47,52
6	Noemuti	1655	603	1052	36,44
7	Bikomi Selatan	1499	907	592	60,51
8	Bikomi Tengah	1124	795	329	70,73
9	Bikomi Nilulat	586	346	240	59,04
10	Bikomi Utara	758	429	329	56,60
11	Naibenu	515	306	209	59,42
12	Noemuti Timur	547	197	350	36,01
13	Kota Kefamenanu	5656	3327	2329	58,82
14	Insana	2571	1139	1432	44,30
15	Insana Utara	1034	983	510	65,84
16	Insana Barat	1241	861	380	69,38
17	Insana Tengah	1482	1171	311	79,01
18	Insana Fafinesu	766	550	216	71,80
19	Biboki Selatan	1187	615	572	51,81
20	Biboki Tanpah	837	436	401	52,09
21	Biboki Moenleu	818	504	314	61,61
22	Biboki Utara	1486	720	766	48,45
23	Biboki Anleu	2396	1064	1332	44,41
24	Biboki Feotleu	603	380	223	63,02
Timor Tengah Utara		33.290	18.498	14.792	55,57

Sumber: Dinas P2KB Kabupaten TTU, 2022

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang belum terlayani di Kabupaten Timor Tengah Utara tahun 2022 masih tinggi dan presentasi pasangan usia subur yang menjadi peserta aktif KB yang tergolong rendah yaitu 55,57 persen dan masih jauh dari yang

diharapkan sedangkan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Badan Kependudukan yaitu 75,0 persen. Hal ini sangat ditentukan oleh seberapa banyak PUS yang mengikuti program KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Berdasarkan data diatas, penulis melakukan wawancara dengan Kepala Dinas P2KB Kabupaten Timor Tengah Utara bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes pada tanggal 9 Januari 2023 tentang pelayanan program Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, beliau mengatakan bahwa: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberikan pelayanan program KB sudah sesuai dengan standar pelayanan. Namun, pelayanan program KB masih memiliki tantangan yaitu tujuan program KB yang masih kontradiksi dengan keyakinan, agama, kesehatan, budaya, dan asasi masyarakat Timor Tengah Utara. Selain itu, rendahnya kesadaran dan kebiasaan untuk menerapkan pola hidup sehat sesuai reproduksi hidup sehat. Pelayanan program KB yang baik dan optimal bukan hanya memberikan sosialisasi namun mampu membuat pasangan aktif KB mampu mengajak masyarakat lain untuk ikut bergabung menjadi peserta KB. Kami akan terus berusaha agar dapat mencapai target dengan cara lebih banyak memberikan pelayanan dan juga memberikan edukasi yang mendalam kepada kader KB sehingga pasangan usia subur yang belum terlayani mendapat pelayanan

Pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera yang merupakan program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan bukti bahwa pemerintah daerah memberikan peran bagi Dinas P2KB Kabupaten Timor Tengah Utara untuk mewujudkan Keluarga Sejahtera maka perlu adanya Kerjasama dengan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) agar dapat memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terutama pasangan usia subur agar mau mengikuti program KB sehingga program dari pemerintah daerah dapat tercapai namun masih ada saja orang menolak untuk mengikuti program KB karena masyarakat masih menganut budaya lama. Terkait hal tersebut, peneliti melakukan wawancara dengan bapak Klemens Nenat, S.Ag selaku Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) Kecamatan Kota Kefamenanu pada tanggal 16 Januari 2023, mengatakan bahwa:

Masih banyak masyarakat yang menolak untuk mengikuti program KB di Kabupaten Timor Tengah Utara karena masih banyak masyarakat yang menganut budaya lama yaitu para orang tua akan terus berusaha untuk mendapatkan anak laki-laki agar dapat meneruskan nama keluarga (marga). Adapun masyarakat yang lebih memilih untuk memakai kondom karena mudah didapatkan di apotik dari pada menggunakan alokon (alat dan obat kontrasepsi), hal itu memang sangat sulit untuk di kontrol dikarenakan tidak ada aturan yang mengatur tentang hal tersebut.

Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mewawancarai masyarakat yang tidak menjadi peserta KB agar mengetahui alasan tidak mengikuti program KB. Peneliti bertanya kepada ibu Maria Desiana Naisoko pada tanggal 19 Januari 2023, mengatakan bahwa:

Suami saya menginginkan untuk, mendapat anak laki-laki untuk meneruskan nama keluarga dari suami saya sehingga sampai saat ini saya belum bisa menggunakan alat kontrasepsi. Belum lengkap rasanya apabila belum memiliki anak laki-laki. Jika saya dan suami sudah mendapatkan anak laki-laki, mungkin saya akan berpikir untuk menggunakan alat kontrasepsi.

2. Jumlah Penyebaran Alat Kontrasepsi

Penyebaran alat kontrasepsi kepada masyarakat Kabupaten Timor Tengah Utara yang disebarakan lewat PKB (Pembina Keluarga Berencana) di tiap keluarahan lewat pemasangan alat kontrasepsi yang di lakukan di Puskesmas.

**Tabel Jumlah Penyebaran Alat Kontrasepsi
di Kabupaten TTU Tahun 2022**

NO	KECAMATAN	CAKUPAN PESERTA KB / JENIS ALAT KONTRASEPSI						
		MOW	MOP	IUD	IMPL	SNTK	PIL	KDM
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Miomaffo Timur	71	0	19	200	411	25	0
2	Miomaffo Barat	38	0	9	221	691	45	1
3	Biboki Selatan	37	1	0	147	410	15	0
4	Noemuti	30	1	50	235	228	46	9
5	Kota Kefamenanu	287	8	138	419	2022	188	8
6	Biboki Utara	54	1	66	407	143	21	7
7	Biboki Anleu	40	1	17	376	600	26	0
8	Insana	62	0	16	302	722	32	1
9	Insana Utara	37	0	14	289	611	22	1
10	Noemuti Utara	9	0	2	85	95	0	0
11	Miomaffo Tengah	24	0	1	153	254	14	1
12	Musi	13	0	9	143	151	4	0
13	Mutis	2	1	2	136	454	6	0
14	Bikomi Selatan	38	0	22	188	648	9	0
15	Bikomi Tengah	26	0	7	199	512	44	3
16	Bikomi Nilulat	13	0	2	129	165	28	9
17	Bikomi Utara	11	0	3	146	257	7	0
18	Naibenu	9	0	1	100	189	5	1
19	Insana Fafinesu	21	0	13	112	395	8	0
20	Insana Barat	87	0	31	264	359	103	0
21	Insana Tengah	51	0	23	267	754	55	0
22	Biboki Tanpah	34	0	7	211	174	7	1
23	Biboki Moenleu	22	0	0	126	337	12	0
24	Biboki Feotleu	31	0	0	116	197	35	0
Timor Tengah Utara		1047	13	452	4971	10.770	757	42

Sumber: Dinas P2KB Kabupaten TTU, 2022

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa jumlah peserta aktif KB yang banyak digunakan adalah KB suntik yaitu sebanyak 10.770 dan yang paling tidak diminati yaitu KB MOP (Metode Operasi Pria) yang hanya berjumlah 13. Hal tersebut membuktikan bahwa masih kurangnya partisipasi dari pria dalam ber-KB. Hal ini dibenarkan oleh bapak Theofilus Bifel, A.Md.Kep selaku Kepala Bidang Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Dinas P2KB Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 11 Januari 2023, memaparkan bahwa:

Partisipasi laki-laki dalam ber-KB sangatlah kurang dikarenakan kami berfokus pada pencapaian target peserta KB perempuan dengan harapan istri dapat mengkomunikasikan dan mensosialisasikan pemakaian alat kontrasepsi (alkon) kepada suaminya. Banyak laki-laki yang mengartikan KB

merupakan tanggung-jawab perempuan. Ada juga yang beranggapan bahwa menggunakan alkon hanya akan mengurangi kekuatan pria saat melakukan hubungan seksual.

3.1.2 Mutu dan Kualitas

Untuk mendapatkan kepuasan dari masyarakat maka mutu dan kualitas yang harus ditingkatkan yaitu peningkatan kualitas SDM dari para petugas pelayanan serta sarana dan prasarana dalam mendukung program KB.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia sangat mempengaruhi mutu dan kualitas dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama dibidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan. Modal untuk menentukan peningkatan pelayanan dinas dimulai dari kompetensi para petugas pelayanan yang berkualitas. Untuk itu petugas pelayanan diberi pelatihan untuk meningkatkan *skill* dan kemampuan mereka agar pelayanan yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam keberhasilan dari program KB. Pelayanan program KB dilihat dari cukup tidaknya jumlah pegawai sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan pelayanan program KB. Jika jumlah pegawai tidak cukup maka pelayanan yang diberikan akan lama dan tidak optimal. Hal tersebut membuat peneliti berfokus pada jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) yang memberikan pelayanan di setiap kecamatan.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, bapak Frans Xav. Tas'au, SKM., M.Kes pada tanggal 9 Januari 2023, berkaitan dengan jumlah personil PKB Kabupaten Timor Tengah Utara, memaparkan bahwa:

Kebutuhan Pegawai menjadi faktor penting karena akan mempengaruhi kinerja Dinas P2KB. Memang PKB dibantu oleh P3K dalam melakukan pelayanan namun tetap saja masih kurang dikarenakan P3K hanya diperbantukan di kecamatan yang memiliki jumlah desa atau kelurahan yang lebih banyak sedangkan di kecamatan yang kecil tidak ada P3K yang membantu pelayanan. Hal tersebut membuat pelayanan yang diberikan sedikit terhambat dan kurang optimal karena jumlah pegawai di setiap kecamatan tidak sebanding dengan luas wilayah setiap kecamatan. Seharusnya, tiga PKB bertanggungjawab memberikan pelayanan KB serta sosialisasi tentang program KB di setiap kecamatan. Untuk mengatasi masalah tersebut kami sedang berusaha agar jumlah PKB dapat ditambah.

Hal tersebut juga dibenarkan oleh ibu Maria Ermelinda Kono, S.Kom selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan dalam wawancara pada tanggal 12 Januari 2023, berkaitan dengan jumlah pegawai Penyuluh Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara memaparkan bahwa:

Jumlah Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) saat ini memang sangat kurang sedangkan mereka memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar bukan hanya melakukan penyuluhan namun juga terus mengawasi perkembangan serta mendata pasangan KB aktif. Sebenarnya kami sedang berusaha untuk menambah jumlah PKB namun sulit karena gaji yang diterima cuman seadanya saja karena mereka bukanlah PNS.

2. Sarana dan Prasarana

Pembuatan sarana dan prasarana disesuaikan dengan yang dibutuhkan organisasi atau lembaga atau perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat digunakan

sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan dari suatu proses produksi atau dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Peneliti ingin mengetahui apakah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, PKB, dan Puskesmas memiliki sarana dan prasarana dalam pelayanan yang diberikan lengkap dari segi sarana dan prasana, oleh karena itu peneliti melakukan wawancara bersama Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes tanggal 9 Januari 2023, mengatakan bahwa: Dalam pelayanan program KB, Dinas P2KB Kabupaten Timor Tengah Utara memiliki sarana prasarana yang bisa dibilang mendukung kemudian sarana prasaran tersebut dibagikan ke puskesmas dan balai penyuluhan keluarga berencana yang ada disetiap kecamatan. Sarana prasarana yang dimiliki oleh Dinas P2KB merupakan pengadaan langsung dari provinsi.

Berikut merupakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel Inventaris Barang Peralatan dan Mesin
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTU Tahun 2022**

No	Jenis/ Nama Barang	Jumlah (Unit/Buah)
1	2	3
1	Lemari	4
2	Filling Kabinet	3
3	Meja Kerja Pejabat Es III	4
4	Meja Setengah Biro	16
5	Kursi Lipat	6
6	Kursi Rapat Plastik	6
7	White Board	9
8	Sofa	1
9	Brand Kas	1
10	Mesin TIK	2
11	Sepeda Motor	86
12	IUD KIT	65
13	Lemari Berkas	3
14	Faximily / Jaringan	1
15	Obgyn Bed	48
16	Implant KIT	36
17	Public Adres	10
18	Mic Wireles	1
19	Laptop	15
20	IUD KIT Biasa	2
21	IUD KIT Stelisator Uap	32
22	IUD KIT Stelisator Listrik	32
23	VTP KIT	5
24	Implant Removal KIT	42
25	Meja Kerja	12

26	Komputer PC	17
27	Printer Brother Laser Jet	2
28	Kursi Rapat	32
29	Kursi Kerja	27
30	Almari	7
31	Exhaust Fan	22
32	Kipas Angin	13
33	Rak	7
34	Meja Rapat	7
35	Kendaraan Dinas Roda 4 (Toyota)	1
36	Mobil Fungsional Jemput Antar Calon Akseptor KB	1
37	Sofa Tamu	1
38	Kotak Pengaduan	9
39	Printer Laser Jet M 125a	2
40	Gordyn Kantor	3
41	Lemari Tempat Penyimpanan KIT / Alkon	19
42	Proyektor + Attachment	10
43	Kursi Kerja Pejabat Es II	1
44	Kursi Kerja Pejabat Es III	3
45	Kursi Kerja Pejabat Es IV	4
46	Meja Kerja Pejabat Es II	1
47	Meja Kerja Pejabat Es IV	4
48	Lemari Es II	1
49	Mesin Pemotong Rumput	1
50	Mobil Mupen Double Cabin	1
51	USB Modem	1
52	DVD Player	1
53	Camera Canon	1
54	Video Camera	1
55	Mixer Amplifier	1
56	Power Amplifier	1
57	Mixing Amplifier	1
58	Mic Kabel Share	6
59	Fast Fold Screen 60 Inchi	1
60	Automatic Voltage Regulator Toyosaki	1
61	Rechargeable Emergency Light Krisbow	1
62	Power Cable Genset Futaba	1
63	Aluminium Folding Krisbow	1
64	Tenda Mupen	1
65	SmartPhone Samsung	22
66	Mobil	6

3.1.3 Efisiensi

Pemberian pelayanan program KB dengan cepat dan tepat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara harus memiliki kemampuan yang efisien.

1. Ketepatan Waktu Pelayanan

Pelayanan yang lebih cepat tentunya dapat menguntungkan pemerintah dan masyarakat, sedangkan pelayanan yang memakan waktu diluar perkiraan menjadikan masalah semakin sulit diselesaikan dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam memberikan pelayanan. Hal ini selaras dengan yang dikatakan oleh Pengelola Program KB di Puskesmas Kelurahan Kota Kefamenanu pada tanggal 17 Januari 2023 yakni bapak drg. Richard Malelak sebagai berikut:

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilaksanakan dengan adminitrasi kemudian secara cepat dan tepat dilakukan tindakan medis. Adapun masyarakat yang datang dan meminta agar mengganti alat kontrasepsi karena adanya efek samping. Untuk mengganti alat kontrasepsi bisa langsung dilakukan di puskesmas ataupun di fasilitas kesehatan lainnya. Pelayanan yang kami berikan sebenarnya cepat namun akan berbelit-belit apabila ada masyarakat yang kurang mampu datang untuk mengganti alat kontrasepsi belum memiliki KTP dan juga BPJS tentunya akan mempersulit pada saat masyarakat ingin mendaftar untuk mendapatkan pelayanan.

Berdasarkan wawancara di atas, dijelaskan bahwa pelayanan KB yang diberikan kepada masyarakat sebenarnya membutuhkan waktu yang singkat namun akan sangat berbelit-belit apabila masyarakat yang datang belum memiliki KTP dan juga BPJS. Demikian halnya yang disampaikan oleh ibu Lusia Amleni yang merupakan Peserta KB aktif dalam wawancara yang dilakukan penulis tanggal 19 Januari 2023, terkait teknis pelayanan ganti metode KB sebagai berikut:

Saya puas dengan pelayanan pergantian alat kontrasepsi karena cepat selesai sebagai pasien yang menerima pelayanan KB. Pasangan saya sebelumnya memberikan persetujuannya kepada saya untuk menggunakan KB suntik 3 bulan untuk jangka waktu dua tahun. Tapi, efek sampingnya membuat saya kegemukan dan haid saya sering tidak menentu. Bidan menyarankan agar saya mengganti metode suntik ke metode Implant dan langsung dilakukan dengan cepat di ruang pelayanan KB. Dibandingkan dengan KB suntik, saya merasa puas dan memiliki pengalaman KB yang lebih baik.

2. Anggaran

Efisiensi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara juga di dukung oleh alokasi anggaran yang di berikan dari pemerintah Anggaran sesuai dengan Renstra (Rencana strategis) dan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). Untuk mengetahui anggaran dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Kabupaten Timor Tengah Utara terserap dengan efektif oleh karena itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara pada hari Senin, Tanggal 9 Januari 2023, bahwa:

Untuk anggaran tahun ini Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara mendapat 12,3 Miliar dan untuk program KB 6,5 Miliar, anggaran ini sangat terbatas karena jika di kurangi dengan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bercermin dari anggaran tahun lalu maka realisasinya adalah 85,51%. Alokasi anggaran untuk beberapa tahun pada saat Pandemi Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTU tahun 2021-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Anggaran yang di Covid 19 mengalami *refocusing* sehingga kami harus memangkas beberapa program tambahan. Tapi dalam realisasi di lapangan kami harus meningkatkan pelayanan program kami dan membutuhkan anggaran.

Hal inilah yang menjadi hambatan kami dalam meningkatkan pelayanan kami apalagi kami ingin melakukan inovasi atau terobosan baru dalam meningkatkan pelayanan kami.

3.1.4 Fleksibilitas

Suatu organisasi harus mampu mengatasi segala perubahan dan hambatan yang ada di lapangan baik itu yang sudah di perkirakan maupun tidak.

1. Kemampuan Beradaptasi

Peneliti ingin mengetahui kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menghadapi segala bentuk perubahan dan kendala di lapangan terutama di saat Pandemi Covid 19, untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 9 Januari 2023, mengatakan bahwa:

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara adalah dinas yang melakukan pelayanan yang cukup vital. kami harus mengajak, menyuluh dan menggerakkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. oleh karena itu kami harus mampu mempelajari dinamika masyarakat yang terus berubah, untuk mengatasinya kami melakukan evaluasi 2 kali dalam sebulan agar kami mengetahui apa saja kendala petugas di lapangan dan bersama-sama mencari jalan keluar.

Mempertegas pernyataan dari Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, peneliti juga melakukan wawancara dengan bapak Klemens Nenat, S.Ag selaku PKB Kecamatan Kota Kefamenanu tanggal 16 Januari 2023, mengatakan bahwa:

PKB sebagai petugas lapangan yang turun langsung menghadapi masyarakat harus bisa melakukan perubahan atau beradaptasi terhadap situasi yang majemuk di masyarakat. PKB dalam sistem kerjanya mengikuti arahan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan BKKBN Provinsi NTT sebagai perwakilan pemerintah pusat dan daerah, yang tentunya setiap tahun mengalami perubahan kebijakan. Kami juga harus mampu untuk beradaptasi terhadap kondisi masyarakat di lapangan karena kami sadar tidak sepenuhnya masyarakat patuh terhadap kebijakan dari pemerintah dan pelayanan KB ini belum menjadi suatu kewajiban sehingga masyarakat juga mempunyai hak untuk tidak mengikutinya. Untuk situasi Pandemi Covid 19 kami mengikuti kebijakan dari Kementerian Kesehatan dan BKKBN dimana untuk setiap penyuluhan, pelayanan dan penggerakan secara langsung kami harus mengikuti protokol kesehatan dan untuk pemasangan alkon setiap petugas Puskesmas harus menggunakan APD lengkap. Kami selalu mencatat segala situasi yang terjadi di lapangan sehingga pada saat evaluasi dengan pimpinan kami dapat menyapaikannya sehingga menjadi pertimbangan untuk kebijakan-kebijakan selanjutnya

2. Dasar Hukum

Selanjutnya Peneliti ingin mengetahui apakah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara mempunyai dasar hukum dan mengikutinya dengan baik, serta adakah regulasi yang dibuat dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, oleh karena itu peneliti wawancara bersama ibu Frans Xav. Tas'au. SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara pada 9 Januari 2023, mengatakan bahwa:

“Dasar hukum melaksanakan pelayanan KB itu langsung dari UU No. 23 Tahun 2014 pada bagian Pemerintah Daerah bertugas dalam Kependudukan, berarti dalam pengendalian jumlah penduduk dan Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara. Menetapkan target dan biaya operasional itu langsung dari BKKBN Provinsi, Dinas hanya menjalankan Perintah dari Provinsi langsung terkait pelayanan KB dan melaporkan sebagai bentuk pertanggung jawaban.”

Peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Maria Ermelinda Kono, S.Kom selaku Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara tanggal 12 Januari 2023, memaparkan bahwa: Secara teknis pelayanan program KB oleh Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara berpedoman pada Peraturan Kepala BKKBN Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran. Pada peraturan ini sudah di jelaskan tahap - tahapannya dan kita harus mengikuti prosedur itu, apalagi kan KB ini untuk kesehatan reproduksi, jika kita tidak mengikuti standar pelayanan yang ada, maka nyawa taruhannya.” Kemudian dalam menjalankan tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten TTU diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 57 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara

3.1.5 Kepuasan

Untuk menjaga minat terhadap pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara mementingkan kepuasan terhadap masyarakat sebagai tujuan utama pelayanannya.

Peneliti melakukan observasi pada tanggal 20 Januari 2023 di Kecamatan Kota Kefamenanu untuk melihat proses penyuluhan dari PKB di Kecamatan Kota Kefamenanu guna menilai secara langsung kepuasan masyarakat terhadap pelayanan program KB khususnya pada tahap penyuluhan. Pemaparan materi, bertambahnya warga yang hadir sebagai peserta KB aktif, dan selesainya proses penyuluhan semuanya menunjukkan bahwa persiapan untuk memberikan penyuluhan langsung ke masyarakat cukup berhasil. Warga juga menunjukkan minat dan kepuasan terhadap layanan yang ditawarkan oleh petugas lapangan. Sesuai hasil observasi tersebut, peneliti juga mewawancarai ibu Yane Liem sebagai salah satu warga yang dulunya menjadi peserta KB aktif kemudian berhenti dan menjadi Kembali peserta KB aktif (Peserta KB putus-pakai) mengatakan bahwa: Saya puas dengan pelayanan kontrasepsi sebagai pasien karena pelayanan KB cepat selesai. Sebelumnya, saya berhenti menggunakan kontrasepsi karena prosedurnya terlalu lama dan rumit, serta sedikit konseling, yang menyebabkan efek samping seperti menjadi lebih gemuk dan menstruasi yang tidak teratur. Pelayanannya sekarang lebih cepat. Ketika saya pertama kali tiba di puskesmas, bidan langsung menyarankan agar saya mengganti metode implant. Hal ini segera ditangani di ruang pelayanan KB. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, saya merasa puas dan memiliki pengalaman keluarga berencana yang lebih baik.

Peneliti juga ingin mengetahui hasil evaluasi dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara mengenai tingkat kepuasan dari masyarakat terhadap pelayanan program KB untuk itu peneliti melakukan wawancara dengan bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara pada tanggal 9 Januari 2023, bahwa:

Kami mengakui bahwa untuk beberapa waktu belakangan ini mulai dari tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2022 ada respon yang baik dari masyarakat terhadap kinerja dari Dinas P2KB Kabupaten Timor Tengah Utara, Penyuluh Keluarga Berencana dan Puskesmas. Kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah menghasilkan suatu pelayanan yang baik. Kami selalu menerima

masukannya dari masyarakat terhadap kinerja kami, pada saat kami memberikan pelayanan program KB kepada masyarakat tidak lupa kami bertanya adakah masukan atau saran terhadap kinerja kami, hal ini membuat masyarakat berpikir bahwa kami juga membutuhkan saran dari mereka terkait kinerja kami. Kami juga memberikan nomor kami kepada mereka sehingga jika ada pelayanan yang kurang baik mereka dapat menelpon kami.

3.2 Faktor-faktor yang menghambat pelayanan program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara

1. Adat Istiadat

Kabupaten Timor Tengah Utara merupakan daerah yang menganut sistem patrilineal dalam menurunkan marganya. Sistem Patrilineal merupakan sistem yang mengajarkan bahwa anak laki-lakilah yang akan meneruskan garis keturunan, jika didalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keluarga itu tidak lengkap menurut sistem adat, oleh sebab itu kedua orang tua akan berusaha untuk mencari anak laki-laki untuk melanjutkan garis keturunan. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara sangat kewalahan menghadapi hal ini terbukti dari wawancara bersama bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada tanggal 9 Januari 2023, mengatakan bahwa: Tantangan yang dihadapi sekarang ini adalah adat istiadat kita sebagai kupang yang menganut sistem patrilineal dalam melanjutkan garis keturunan, oleh sebab itu misalnya didalam sebuah keluarga tidak memiliki anak laki – laki, padahal anaknya sudah 5 perempuan semua, ya keluarga itu akan mencari anak laki-laki terus bahkan ada yang sampai beristri 2 untuk mencari anak laki - laki.

Peneliti melakukan wawancara dengan ibu Maria Apri Naisoko sebagai masyarakat yang tidak menjadi peserta KB aktif pada tanggal 19 Januari 2023, memaparkan bahwa: Saya belum bisa menggunakan alat kontrasepsi karena kami belum mendapatkan anak laki-laki, anak kami sudah 3 dan semuanya perempuan, suami saya menginginkan anak laki-laki untuk meneruskan marganya. Suasana rumah saya tidak lengkap kalau belum memiliki anak laki-laki yang nantinya bisa membantu pekerjaan bapaknya.

2. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara menerangkan bahwa sampai saat ini salah satu faktor penghambat pelayanan KB adalah masih banyak masyarakat yang belum memahami cara pakai dari alat kontrasepsi seperti masyarakat yang tidak mau menggunakan alat kontrasepsi karena takut gemuk, wajahnya muncul bintik-bintik hitam dan malas bolak-balik suntik ke Puskesmas. Pada saat peneliti melakukan observasi pada saat penyuluhan KB ditemukan bahwa hampir semuanya adalah wanita dan laki-lakinya hanya satu atau dua orang. Setelah bertanya terkait hal tersebut ternyata masih banyak laki-laki yang menjadi pasangan KB aktif belum paham akan program KB pada laki-laki contohnya vaksetomi yang dianggap dapat membuat kelamin mati atau tidak berguna lagi. Dari beberapa contoh pemahaman masyarakat yang kurang dan salah terkait program KB ini lah menjadi faktor penghambat dan menyebabkan terjadinya kenaikan angka kelahiran. Di era digital ini sebenarnya masyarakat dapat menemukan informasi yang lebih banyak mengenai pelayanan program KB dari internet maupun sosial media karena sebenarnya program KB bukan merupakan hal yang baru di masyarakat. Walaupun pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi dan edukasi mengenai program KB tetapi kesadaran masyarakat juga penting untuk mendukung program KB.

3.3 Upaya yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam menghadapi faktor-faktor penghambat

1. Melakukan Kerjasama Dengan Lembaga Pendidikan

Hambatan yang terjadi terkait masalah adat istiadat yang masih kental berusaha dihilangkan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dengan bekerja sama dengan Lembaga pendidikan seperti beberapa SMA dan Universitas yang ada di Kabupaten Timor Tengah Utara. Pemberian sosialisasi dan edukasi kepada siswa di tingkat SMA dan Universitas diharapkan dapat menghilangkan budaya lama yang menyebabkan pelayanan program KB menjadi terhambat.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara, bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes tanggal 9 Januari 2023 terkait sosialisasi di sekolah dan universitas, mengatakan bahwa:

Sosialisasi yang dilakukan di sekolah dan universitas sudah diterapkan dari tahun 2010, namun pelaksanaannya bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Timor Tengah Utara sehingga materi yang di sampaikan hanya bersifat umum saja. Namun, mulai dari tahun 2020, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara melakukan sosialisasi sendiri sehingga setiap sekolah atau universitas yang kami kunjungi benar-benar memahami manfaat dari program KB dan yang lebih penting dapat menghilangkan adat istiadat yang melarang ber-KB.

2. Memanfaatkan Sosial Media dalam Sosialisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam upaya merespon kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan alat kontrasepsi memanfaatkan media sosial seperti *Whatsapp* dan *facebook*. Pemberian informasi dan edukasi dalam memberikan pemahaman masyarakat telah dilakukan dengan membuat grup Whatsapp dengan masyarakat dan PKB dengan basis Kelurahan sehingga penyampaian yang diberikan dapat berupa teks maupun video penyuluhan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara bapak Frans Xav. Tas'au, SKM.,M.Kes pada tanggal 9 Januari 2023, menerangkan bahwa:

Dalam membantu memberikan informasi kepada masyarakat Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara berinovasi dengan memanfaatkan media sosial seperti *Whatsapp* dan *Facebook*. Hal ini sangat membantu kami dalam mentransfer informasi secara cepat dan akurat sehingga masyarakat tidak kebingungan apa bila adanya pejemputan untuk pelayanan KB.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan dari penelitian yang dilakukan yaitu Efektivitas Pelayanan Program KB di Dinas Pengendalian Kependudukan dan Dinas Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara kurang efektif karena memiliki beberapa kendala seperti adat istiadat yang sangat mengikat, kurangnya petugas lapangan dan kekurangan anggaran. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (2001:24), "Efektivitas merupakan pemanfaatan sumberdaya alam atau manusia, sarana, dan prasarana yang sudah ditentukan yang bertujuan untuk menghasilkan barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya sesuai harapan". Maka efektivitas merujuk kepada keberhasilan suatu kegiatan yang dimana tercapai atau tidaknya kegiatan tersebut yang telah ditetapkan, jika hasil kegiatan tersebut mendekati keinginan yang dituju maka semakin tinggi efektivitasnya.

Peneliti merekomendasikan koordinasi yang baik dengan pimpinan daerah agar dapat disediakan anggaran yang memadai dan penambahan petugas lapangan untuk meningkatkan pelayanan menjadi lebih baik.

IV. KESIMPULAN

Pada penelitian ini untuk mengukur Efektivitas Pelayanan Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara penulis menggunakan teori dari Gibson dan Steers yang terdiri dari lima dimensi. Dari kelima dimensi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan program Keluarga Berencana oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana belum berjalan dengan efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat.

1. Faktor-faktor penghambat dalam pelayanan Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:
 - a) Adat istiadat yang masih kental dimana anak laki-laki menjadi penerus marga sehingga kedua orang tua akan berusaha untuk mencarinya;
 - b) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang program KB sehingga masih merasa takut dengan segala efek samping dari penggunaan alat kontrasepsi;
2. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara dalam mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelayanan KB di Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:
 - a) Bekerja sama dengan Lembaga pendidikan di tingkat SMA dan Universitas agar menanamkan edukasi dan informasi mengenai program KB dan pengendalian angka kelahiran sebagai bekal mereka ketika menjadi pasangan usia produktif;
 - b) Memanfaatkan Sosial Media dalam Sosialisasi sehingga mengurangi anggaran yang ada dan lebih efisien;

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara saja.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan mengukur Efektivitas Pelayanan Program KB oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Timor Tengah Utara beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Siagian, Sondang P. (2001). *Administrasi Pembangunan*. Surabaya : Pustaka Agung
- Sumaryadi. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama Media.
- Wasistiono, Sadu. (2003). *Kapita Selekta manajemen pemerintahan daerah*. Fokus media,
- Abdurrahman, A., Rachman, M. T., & Ayu, D. P. (2019). *Strategi Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Dalam Pelaksanaan Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Mataram*. *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 139-152.

Febriani, D., Alhusni, A., & Hartono, S. (2020). *Upaya Pemerintah Dalam Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk Studi Di Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional Kota Jambi* (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi).

Restiyani, N. L. N., & Yasa, I. G. W. M. (2019). *Efektivitas program Kampung Keluarga Berencana (KB) dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga miskin di Kota Denpasar*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 8(7), 711-740.

Suhartini, D. (2019). *Efektivitas Penggunaan Alat Kontrasepsi Pada Pasangan Usia Subur (PUS) di Provinsi Sulawesi Selatan*.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga

<https://kbbi.web.id/negara>, diakses 14 Oktober 2022

https://kupang.tribunnews.com/2020/06/21/kepala-bkkbn-provinsi-ntt_keluarga-harus-memiliki-perencanaan-yang-matang, diakses 16 Oktober 2022

<https://ntt.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>, diakses 17 Oktober 2022

https://ntt.bps.go.id/indicator/12/533/1/proyeksi-laju-pertumbuhan_penduduk.html, diakses pada 17 Oktober 2022

[Badan Pusat Statistik Kabupaten Timor Tengah Utara \(bps.go.id\)](https://timortengahutarakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/596d1dd19f0aef0ff67e875b/kabupate), diakses pada 18 Oktober 2022

<https://timortengahutarakab.bps.go.id/publication/2022/02/25/596d1dd19f0aef0ff67e875b/kabupate-n-timor-tengah-utara-dalam-angka-2022.html>

